

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk terhadap komunikasi resmi pemerintah dalam kebijakan WFH hemat energi melalui konferensi pers dan media sosial resmi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dimensi Teks (Struktur Wacana): Pemerintah tidak membingkai kebijakan WFH hemat energi sebagai respons atas krisis atau kelangkaan energi, melainkan menyusunnya melalui re-framing positif sebagai “Transformasi Budaya Kerja Nasional” dan “Modernisasi Birokrasi Digital”. Melalui struktur makro, superstruktur, dan mikrostruktur, teks resmi secara konsisten memanfaatkan eufemisme, klaim angka-angka rasional (seperti potensi penghematan APBN Rp6,2 triliun dan BBM Rp59 triliun), serta penegasan retorik yang masif seperti “WFH Bukan Libur” untuk mengunci makna WFH mutlak sebagai alih lokasi kerja, bukan pelanggaran disiplin.
2. Dimensi Kognisi Sosial: Pembuat wacana (pejabat dan pengelola media sosial institusi) memproduksi pesan berbasis pengetahuan teknokratik atas kerentanan APBN dan risiko krisis kepercayaan publik. Kognisi pemerintah didorong oleh ideologi *teknokrasi-efisiensi* dan *neoliberal-modernisasi birokrasi*, di mana masalah krisis makro-energi diselesaikan melalui rekayasa tata kelola administratif serta pembentukan subjek pekerja yang mandiri, adaptif, dan bertanggung jawab atas produktivitasnya secara individual.
3. Dimensi Konteks Sosial: Wacana kebijakan ini diproduksi di tengah eskalasi krisis energi global 2026 (gangguan Selat Hormuz) yang berdampak langsung pada beban subsidi APBN sebagai *net oil importer*. Kebijakan komunikasi ini berfungsi sebagai strategi mitigasi fiskal negara

yang menggeser beban penyesuaian krisis makro menjadi aturan disiplin harian di tingkat mikro masyarakat.

4. Sintesis Pembongkaran Kritis: Komunikasi resmi pemerintah bekerja melalui tiga strategi diskursif utama: (a) Depolitisasi Krisis, yaitu mengeliminasi istilah krisis energi/anggaran menjadi narasi positif modernisasi; (b) Individualisasi Tanggung Jawab (*Responsibilization*), yaitu mengalihkan beban efisiensi energi negara menjadi tanggung jawab moral dan disiplin individu pekerja; serta (c) Legitimasi Teknokratik dan Penguncian Makna (*Discursive Closure*), yaitu menutup ruang perdebatan publik menggunakan kalkulasi angka dan aturan pengawasan ketat.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

- a. Pengembangan Model Analisis Wacana Kritis (AWK) van Dijk pada Digital Government Communication: Penelitian ini membuktikan bahwa kerangka tiga dimensi van Dijk (Teks, Kognisi Sosial, Konteks Sosial) sangat efektif untuk membongkar teks-teks kebijakan publik yang terfragmentasi di media sosial (Instagram Carousel dan Reel/Shorts) dan konferensi pers hibrida.
- b. Pengayaan Kajian Komunikasi Kebijakan Publik: Temuan ini memperluas teori komunikasi pemerintah dengan menunjukkan bahwa saluran komunikasi digital resmi tidak hanya berfungsi sebagai alat diseminasi informasi, melainkan sebagai arena kontestasi makna dan hegemoni negara untuk mendefinisikan realitas krisis menjadi realitas efisiensi.

2. Implikasi Praksis

- a. Bagi Formulator Komunikasi Pemerintah: Penyusunan pesan publik di masa krisis hendaknya tidak terlalu dominan mengandalkan

strategi *responsibilization* (mengalihkan beban ke masyarakat/pekerja), melainkan juga menonjolkan transparansi serta keadilan distribusi beban antara pemerintah, pemilik modal/pengusaha, dan pekerja.

- b. Bagi Literasi Media Digital Masyarakat: Hasil penelitian ini implikatif bagi penguatan literasi kritis masyarakat agar mampu membaca teks kebijakan pemerintah secara kritis tidak hanya menerima narasi permukaan di media sosial, tetapi juga memahami strategi retorika dan kepentingan ideologis/fiskal di baliknya.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Instansi Pemerintah (KemenPANRB, Kemensetneg, Kemnaker): Disarankan agar strategi komunikasi publik di era digital tidak hanya berfokus pada pengawasan (*controlling*) dan penguncian makna (*boundary-setting*), tetapi juga menyediakan ruang dialog dua arah (*two-way symmetrical communication*) untuk menyerap aspirasi dan kendala riil pekerja di lapangan.
2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:
 - a. Disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan mengkaji dimensi konsumsi wacana (*Audience Reception Analysis*), yaitu mengukur sejauh mana masyarakat/ASN menerima, mengesampingkan, atau menolak (*negotiated/oppositional reading*) framing “WFH Hemat Energi” ini di kolom komentar media sosial.
 - b. Membandingkan konstruksi wacana pemerintah dengan bingkai media massa arus utama (*mainstream media*) dalam melegitimasi atau mengkritisi kebijakan WFH hemat energi

3. Bagi pembaca dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kritis terhadap pesan-pesan kebijakan yang disampaikan pemerintah di ruang publik. Masyarakat perlu membaca kebijakan tidak hanya dari isi permukaannya, tetapi juga dari cara kebijakan tersebut dikonstruksi dalam komunikasi resmi.



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**